

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1.Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholdernya*. Kelompok *stakeholder* yaitu pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya yang ikut serta dalam pencapaian tujuan perusahaan, dimana kemakmuran suatu perusahaan bergantung kepada dukungan dari para *stakeholdernya* [8]. *Stakeholder* menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan perusahaan. Teori *stakeholder* memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan terciptanya nilai perusahaan sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan dibagi kedalam dua bentuk besar yaitu *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder*. *Primary stakeholder* adalah pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti misalnya investor, kreditur, karyawan, komunitas lokal namun disisi lain pemerintah juga termasuk kedalam golongan *primary stakeholder* walaupun secara tidak langsung mempunyai hubungan secara ekonomi, namun hubungan antara keduanya bersifat non kontraktual. *Secondary stakeholder* adalah pihak yang memiliki hubungan saling mempengaruhi namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *stakeholder* jenis ini. Contoh *secondary stakeholder* adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh dan sebagainya. *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan

masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder apabila* memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholdernya* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*, terutama *stakeholder* yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain [8]. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* perusahaan adalah dengan melaksanakan pengungkapan risiko.

Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholdernya*. Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para *stakeholder* untuk mengambil keputusan dalam menanamkan saham. Melalui pengungkapan risiko perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan. Dengan pengungkapan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder*. Semua informasi mengenai pengungkapan risiko yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

2.1.2. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu cabang dari permainan *cooperative* yang mempelajari perancangan kontrak berdasarkan motivasi *agent* secara rasional terhadap kepentingan *principal* ketika *agent* berlawanan sebaliknya dengan kepentingan *principal*. [9]

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain *agent* (manajer) untuk menjalankan aktifitas perusahaannya. Didalam teori keagenan yang dimaksud sebagai *principal* adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan yang menyediakan fasilitas dan dana untuk mengelola perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan *agent* adalah manajemen yang berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana yang dipercayakan oleh *principal*. *Agent* memiliki kewajiban untuk memberikan laporan periodik kepada *principal* tentang usaha yang dijalankannya agar *principal* dapat

menilai kinerja *agent*nya melalui laporan keuangan yang disampaikan. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya. [9]

Inti dari teori keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal*) dan pengendalian (*agent*). *Principal* memiliki harapan bahwa *agent* akan menghasilkan *returns* dari dana yang mereka investasikan. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara *principal* dan *agent* adalah kontrak yang mampu menjelaskan secara spesifik apa saja yang dilakukan oleh *agent* dalam mengelola perusahaan. Namun demikian, ada faktor-faktor lain yang sulit untuk diramalkan sebelumnya, sehingga kontrak yang lengkap sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, investor harus memberikan hak pengendalian kepada manajer yaitu hak untuk membuat keputusan dalam kondisi tertentu yang tidak tercantum dalam kontrak. [9]

Hak pengendalian ini akan menimbulkan masalah keagenan yaitu investor mengalami kesulitan dalam memperoleh keyakinan bahwa dana yang telah diberikan dikelola dengan semestinya oleh manajer. Dengan adanya hak pengelolaan perusahaan yang dimiliki manajer, maka manajer dapat melakukan ekspropriasi seperti penggelapan dana investor dan penjualan aset perusahaan. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. [9]

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan yaitu :

1. *Principal* tidak dapat melakukan verifikasi apakah *agent* telah melakukan sesuatu secara tepat atau tidak.
2. Masalah pembagian risiko yang timbul pada saat *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. [9]

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi yaitu:

1. Asumsi sifat manusia adalah asumsi yang menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversing*).
2. Asumsi keorganisasian adalah asumsi tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent* .

3. Asumsi informasi adalah asumsi yang menyatakan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. [9]

Agent berusaha untuk memaksimalkan *fee* kontraktual yang diterimanya tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan. *Principal* berusaha untuk memaksimalkan *returns* dari penggunaan sumber dayanya tergantung pada *fee* yang dibayarkan kepada *agent*. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian organisasi dinamakan konflik keagenan. Konflik kepentingan ini mengikat anggota-anggota perusahaan untuk menyetujui seperangkat perilaku kerja sama, tergantung motif mementingkan diri sendiri. [9]

Biaya keagenan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi aktifitas dan perilaku manajer antara lain membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan dan premi asuransi untuk melindungi *asset* perusahaan.
2. Biaya *bonding* yang ditanggung manajer untuk memberikan jaminan kepada pemilik bahwa anjer tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.
3. *Residual loss* adalah biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk mempengaruhi keputusan manajer supaya meningkatkan kesejahteraan *principal*. [9]

Konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan dapat diminimalkan dengan cara manajer harus menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham begitupula dalam pengambilan keputusan oleh manajer harus disesuaikan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam menjalankan perusahaan manajer juga dapat dimonitor oleh pemegang saham karena kompleksnya aktifitas perusahaan serta semakin besarnya ukuran perusahaan.

2.1.3. Manajemen Resiko

Manajemen risiko perusahaan (*Enterprise Risk Management*) menurut *International Standard Organization (ISO) 31000* dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarah dan mengendalikan kegiatan perusahaan terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Dengan kata lain, manajemen risiko merupakan seperangkat arsitektur yang terdiri atas prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk mengelola risiko secara efektif. [1]

ISO 31000 adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* pada tahun 2009. Standar ini dibuat agar dapat diterapkan dan disesuaikan untuk semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dalam perusahaan menurut ISO 31000 harus memiliki 11 prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah yaitu berupa kontribusi melalui peningkatan tercapainya sasaran perusahaan, dan perbaikan dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, *corporate governance*, efisiensi operasi, dan lain-lain.
2. Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses organisasi dimana manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen yang tidak terpisahkan dari proses bisnis dan proyek perusahaan dalam mencapai sasaran.
3. Manajemen risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup dengan mempertimbangkan bahwa suatu risiko dapat diterima atau penanganan risiko telah dilakukan secara efektif.
4. Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan cara menanganinya.
5. Manajemen risiko diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efisiensi, konsistensi, komparabilitas, serta perbaikan.
6. Manajemen risiko diterapkan berdasarkan informasi terbaik yang ada seperti pengalaman, hasil observasi, perkiraan, pertimbangan pakar, dan data lainnya. Informasi tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
7. Manajemen risiko diterapkan sesuai dengansesuai dengan konteks internal dan eksternal perusahaan, sasaran perusahaan, profil risiko yang dihadapi perusahaan.

8. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya dimana penerapannya memperhitungkan kapabilitas perusahaan, persepsi, dan tujuan masing-masing individu, baik di dalam maupun di luar perusahaan khususnya yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran perusahaan.
9. Manajemen risiko harus diterapkan secara transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan, para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan disetiap tingkatan perusahaan harus dilibatkan secara efektif.
10. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan dimana apabila terjadi suatu peristiwa tindakan pemantauan dan pengkajian ulang menjadi sangat penting.
11. Manajemen risiko memfasilitasi terjadinya perbaikan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan dengan senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan maturitas dan kualitas pelaksanaan manajemen. [1]

Risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi peluang suatu kejadian dengan konsekuensinya atau akibatnya. Untuk semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan organisasi selalu terdapat potensi kejadian dan akibat yang mungkin berupa keuntungan (*upside risk*) atau bahaya terhadap keberhasilan (*downside risk*). Risiko dapat juga didefinisikan sebagai *pure risk* dan *speculative risk*. Risiko murni adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang jika terjadi pasti menyebabkan kerugian, sedangkan risiko spekulasi merupakan kemungkinan terjadi sesuatu tetapi jika terjadi akibatnya dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Manajemen risiko tidak hanya berkaitan dengan probabilitas aspek risiko negative, tetapi juga risiko positif. [1]

Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yaitu :

1. Membantu pencapaian tujuan organisasi.
2. Organisasi lebih fokus pada prioritas usaha. Memungkinkan pada manajer fokus pada pengalokasian sumber daya pada tujuan utama, sehingga sumber daya tidak perlu dialokasikan ulang karena ada masalah. Hal ini dapat meningkatkan

kepercayaan pemegang saham dan manajemen. Mengambil tindakan pencegahan dan mengurangi kerugian adalah strategi risiko yang efektif.

3. Perubahan budaya yang mendukung diskusi terbuka tentang risiko dan potensi merusak informasi. Budaya baru mentolerir kesalahan tetapi tidak mentolerir penyembunyian kesalahan. Budaya baru juga menekankan perlunya belajar dari kesalahan.
4. Memperbaiki manajemen operasi dan manajemen keuangan dengan memastikan bahwa semua risiko telah dipertimbangkan secara layak dalam proses pembuatan keputusan. Perbaikan manajemen operasi menghasilkan penyampaian jasa lebih efektif dan efisien. Dengan mengantisipasi masalah, para manajer mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bereaksi dan bertindak sehingga organisasi akan mampu untuk menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat sesuai dengan yang dijanjikan.
5. Memperkuat proses perencanaan dan membantu manajemen dalam mengidentifikasi peluang-peluang menguntungkan. [10]

2.1.4. Pengungkapan Manajemen Resiko

Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari risiko sering dikaitkan dengan konotasi negatif seperti bahaya, ancaman, atau kerugian. Risiko juga dapat disebut sebagai ketidakpastian yang dapat menimbulkan perubahan. Perubahan yang terjadi dari risiko ternyata bukan hanya perubahan yang bersifat negatif tapi juga yang bersifat positif.

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh investor dan pengguna laporan keuangan. Pengungkapan manajemen risiko membawa pengaruh baik bagi pihak eksternal

karena menginformasikan bahwa perusahaan telah mengantisipasi risiko-risiko yang ada untuk menghindari kerugian dan mengecewakan investor serta *stakeholder*.

Pengungkapan memiliki tiga konsep yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*), merupakan pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.
2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*), dilakukan agar dapat memberikan perlakuan sama yang bersifat umum bagi semua pengguna laporan keuangan.
3. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*), mensyaratkan perlunya. [8]

Tujuan dilakukan pengungkapan risiko adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antarperusahaan dan antar tahun.
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.
6. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. [11]

Pengungkapan manajemen risiko dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dimensi ISO 31000 tahun 2009, dimana pengukuran variabel pengungkapan manajemen risiko menggunakan 25 item pengungkapan, setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks manajemen risiko masing-masing perusahaan dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan perusahaan dan dibagi dengan jumlah item pengungkapan. Adapun rumus untuk menghitung Pengungkapan Manajemen Risiko adalah : [12]

$$\text{Pengungkapan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Jumlah Pengungkapan}}{\text{Jumlah Item Pengungkapan}} \quad (2.1)$$

2.1.5. Tingkat *Leverage*

Tingkat *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Perusahaan yang memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham atau *stakeholder* dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan sekaligus membatasi investasi mereka [13]. Tingkat *Leverage* merupakan salah satu ukuran penting dalam penentuan struktur modal perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka dapat dikatakan tingkat *leverage* menguntungkan. Sedangkan jika penjualan atau pendapatan lebih rendah dan biaya-biaya lebih tinggi dari yang diharapkan, maka tingkat pengembalian perusahaan akan turun atau tingkat *leverage* merugikan. Ketika *leverage* tidak menguntungkan, perusahaan dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu penggunaan utang mengharuskan perusahaan untuk menyeimbangkan dengan ekspektasi tingkat pengembalian yang tinggi sehingga dapat meningkatkan risiko perusahaan. Risiko perusahaan semakin besar jika perusahaan beroperasi dalam wilayah yang memiliki keadaan ekonomi krisis. Pada penelitian ini tingkat *leverage* diproksikan dengan menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) yaitu dengan membandingkan total utang dengan total aset. Misalnya jika perusahaan memiliki rasio DAR 0,71 atau 71% artinya setiap Rp 1,00 aktiva dibiayai oleh utang sebesar Rp 0,71. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar aset dibiayai oleh utang yang menunjukkan tingginya risiko perusahaan. Formula yang digunakan untuk menghitung DAR adalah [13] :

$$\text{Debt To Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \quad (2.2)$$

2.1.6. Tingkat Profitabilitas

Tingkat Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu [14]. Laba digunakan sebagai pengukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama periode maupun mengestimasi laba usaha sekarang, yaitu sampai sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya operasi dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang saham sehingga laba dikatakan sebagai indikator tingkat profitabilitas

perusahaan. Laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai saham yang menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

Tingkat Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan yang akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi [13]. Tingkat Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja perusahaan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya alam. Kenaikan sumber pedanaan perusahaan, memberi kesempatan perusahaan untuk mengembangkan kegiatan operasinya. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan labanya. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang lebih besar memotivasi manajemen untuk menyediakan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memberikan jaminan kepada investornya. Maka perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung memiliki pengungkapan yang lebih tinggi. Rasio tingkat profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber- sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Formula yang digunakan untuk menghitung *Return on Asset* adalah [14] :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.3)$$

2.1.7. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar perusahaan bisa diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan besar memiliki banyak pemegang kepentingan, oleh karena itu semakin besar perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemegang kepentingan [9]. Ukuran Perusahaan pada penelitian ini menggunakan *total asset* sebagai alat untuk menilai ukuran perusahaan. Formula yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan adalah [16]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Asset} \quad (2.4)$$

2.1.8. Struktur kepemilikan publik

Kepemilikan publik merupakan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan, maka di perlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal diperoleh dari saham masyarakat (publik). Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan, karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media masa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat. Suatu struktur kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Formula yang digunakan untuk menghitung struktur kepemilikan publik adalah [12]:

$$\text{Struktur kepemilikan publik} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Publik}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100 \% \quad (2.5)$$

2.1.9. Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen selalu bertindak demi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan. Sejalan dengan pengertian tersebut *good corporate governance* diartikan sebagai mekanisme yang mengatur tentang cara pengelolaan perusahaan berdasarkan *rules* yang menaungi perusahaan seperti anggaran serta aturan-aturan perusahaan dalam menjalankan usahanya. [17]

(Prinsip – prinsip *Good Corporate Governace* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi/keterbukaan (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan kepada semua *stakeholder*. Hal itu dilakukan dengan mengungkapkan

informasi secara tepat waktu, jujur, akurat, dan berkualitas tentang kondisi bisnis perusahaan.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Harus ada kejelasan peran dan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan, meliputi pemilik saham, dewan komisaris, direksi, manajer, dan auditor sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efisien dan efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan memiliki tanggungjawab sebagai anggota masyarakat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, mematuhi hukum dan bertindak sesuai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik.

4. Kemandirian (*independency*)

Perusahaan harus dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran/keadilan (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*, khususnya menghindari *fraud*, *self-dealing* dan penyimpangan oleh orang dalam perusahaan. [18]

Teknik dan strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menciptakan infrastruktur tata kelola yang baik yaitu dengan menciptakan sistem kontrol yang kuat termasuk fungsi audit internal dan eksternal, fungsi manajemen risiko yang independen dari lini bisnis, dan monitoring khusus untuk exposure risiko dimana konflik kepentingan sangat mungkin terjadi.

Good corporate governance mengharuskan organisasi untuk mengadopsi pendekatan manajemen risiko berdasarkan metode tertentu yang melindungi kepentingan para *stakeholder*, memastikan bahwa dewan direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan strategi, membangun nilai-nilai luhur dan memantau kinerja organisasi dan memastikan bahwa manajemen melakukan pengendalian dan dilakukan secara patut. [10]

Perusahaan harus membuat pernyataan tentang pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dimana dalam penerapannya harus memenuhi prinsip-prinsip *corporate governance* untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Variabel *corporate governance* pada penelitian ini menggunakan 3 proksi yaitu reputasi auditor, komisaris independen, dan *risk management comitee*.

Pengaturan pelaporan manajemen risiko secara formal (resmi) harus dinyatakan secara jelas dan tersedia bagi para *stakeholders*. Pelaporan resmi harus dapat mengungkapkan metode pengendalian, terutama mengenai pertanggung jawaban manajemen menyangkut manajemen risiko, proses yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan bagaimana sistem manajemen risiko dan bagaimana sistem manajemen risiko menyampaikannya, sistem pengendalian risiko yang *significant*, dan pemantauan dan kaji ulang system yang berjalan. Setiap kekurangan penting yang tidak ditangani system atau yang ada dalam sistem itu sendiri, harus dilaporkan disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh. [20]

2.1.9.1 Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self-interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara *principle* dan *agen* sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Audit adalah satu alat ukur untuk mengevaluasi perusahaan terhadap komitmennya untuk menerapkan sistem secara konsisten. Proses audit dalam perusahaan dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Kedua auditor berperan penting dalam tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penelitian ini akan menjelaskan reputasi auditor eksternal sebagai mekanisme untuk meningkatkan manajemen risiko perusahaan. Reputasi auditor eksternal adalah KAP yang memiliki nama baik, prestasi dan memperoleh kepercayaan dari publik yang dimiliki oleh KAP tersebut. Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam kategori KAP *Big Four* di Indonesia yaitu :

1. KAP *Ernst and Young* berafiliasi dengan Purwanto, Suherman dan Surja (PSS)
2. KAP *Price Waterhouse Coopers* (PwC) berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan / PT. Prima Wahana Caraka / PT. Price Waterhouse Coopers Indonesia Advisory.
3. KAP *Deloitte Touche Thomatsu* berafiliasi dengan Osman Satrio dan Eny.
4. KAP *Klynveld Peat MarwickGoerdeler* (KPMG) berafiliasi dengan Sidharta & Widjaja, KPMG Hadibroto dan KPMG Siddharta Advisory.

Pengukuran kualitas auditor dengan menggunakan variabel dummy yaitu apabila perusahaan menggunakan KAP audit big four dalam mengaudit laporan keuangan maka diberi nilai 1 dan sebaliknya diberi nilai 0. Formula yang digunakan untuk menghitung reputasi auditor adalah [20]:

$$\begin{aligned} \text{Audit oleh KAP } \textit{Big Four} &= 1 \\ \text{Audit oleh KAP } \textit{Non Big Four} &= 0 \end{aligned} \quad (2.6)$$

2.1.9.2. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali [22]. Pengangkatan dan

pemberhentian dewan komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Walaupun direksi yang melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan dalam penerapannya, komisaris independen dan anggota dewan komisaris yang lain juga harus menganalisis sistem manajemen risiko perusahaan serta menilai toleransi risiko yang dapat ditanggung perusahaan.

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama, salah satu diantaranya adalah manajemen risiko. Fungsi pengelolaan lain yaitu pengendalian internal juga mencakup upaya memperbaiki efektifitas pengendalian risiko. Efektifitas pengendalian risiko akan membantu meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan bahwa kriteria-kriteria tentang komisaris independen antara lain :

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai dewan komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok dan pelanggan. [22]

Pengukuran komisaris independen dalam penelitian ini yaitu membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dengan rumus sebagai berikut [5]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100 \quad (2.7)$$

2.1.9.3. *Risk Management Committee*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 menyebutkan bahwa *Risk Management Committee* merupakan suatu komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko. Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2011 *menjelaskan Risk Management Committee* atau komite pemantau risiko adalah organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Komite kebijakan risiko bertugas membantu dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota komite kebijakan risiko terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan[5]. RMC dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu apabila perusahaan memiliki RMC terpisah dengan komite audit diberi nilai 1 dan sebaliknya jika RMC tergabung dengan komite audit diberi nilai 0. Formula yang digunakan untuk menghitung *Risk Management Committee* adalah sebagai berikut [20]:

Memiliki RMC terpisah dengan komite audit = 1

Memiliki RMC tergabung dengan komite audit = 0 (2.8)

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Berikut ini review penelitian terdahulu yang memuat replikasi dari penelitian - penelitian terdahulu :

Cahaya Ruwita dan Puji Harto melakukan penelitian pada tahun 2013 [4] dengan judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, frekuensi pertemuan komite audit dan tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan tingkat likuiditas, keahlian finansial komite audit, struktur kepemilikan publik dan jenis kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Edo Bangkit Prayoga dan Luciana Spica Alilia melakukan penelitian pada tahun 2013 [23] dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran

Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Fuji Juwita Sari melakukan penelitian pada tahun 2013 [5] dengan judul “Pengaruh *Corporate Governace*, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap *Enterprise Risk Management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan struktur *Corporate Governance*, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan terbukti mampu meningkatkan pengungkapan ERM.

Ikra Febri Ananda melakukan penelitian pada tahun 2013 [6] dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris terhadap pengungkapan risiko pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan asing, kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen resiko, sedangkan dewan komisaris

Isbriandien Cahya Utami melakukan penelitian pada tahun 2015 [12] dengan judul “Pengaruh dewan komisaris, komite audit, internal audit, komite manajemen risiko dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini mengukur pengungkapan manajemen risiko dengan menggunakan Dimensi ISO 31000 yang terdiri dari lima dimensi dengan total item 25 item pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite manajemen risiko dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan ERM, sedangkan kompetensi dewan komisaris, komite audit independen dan internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM.

Layyinatusy Syifa melakukan penelitian pada tahun 2013 [21] dengan judul “Determinan Pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan *chief risk officer* secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Pengujian parsial

menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor dan *chief risk officer* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

Magda Kumalasari, Subowo dan Indah Anisykurlillah melakukan penelitian pada tahun 2014 [2] dengan judul “Pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan reputasi auditor terhadap luas pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan hotel, restoran, dan pariwisata yang listing di BEI”. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara jumlah pengungkapan risiko yang disajikan dalam laporan keuangan dengan total jenis risiko yaitu 6 jenis risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Windy Gessy Anisa melakukan penelitian pada tahun 2012 [7] dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat *leverage* dan ukuran perusahaan berhubungan positif secara signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan jenis industri, tingkat profitabilitas dan struktur kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh signifikan dengan pengungkapan risiko.

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Cahya Ruwita dan Puji Harto (2013)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Risiko (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011).	<p><u>Variabel Independen</u> ukuran perusahaan, frekuensi pertemuan komite audit, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, keahlian finansial komite audit, struktur kepemilikan publik dan jenis kepemilikan perusahaan</p> <p><u>Variabel Dependen</u> Pengungkapan Risiko</p>	<p><u>Secara simultan</u> ukuran perusahaan, frekuensi pertemuan komite audit, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, keahlian finansial komite audit, struktur kepemilikan publik dan jenis kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial</u> ukuran perusahaan, frekuensi pertemuan komite audit dan tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko</p>

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang digunakan	Hasil yang diperoleh
			perusahaan, sedangkan tingkat likuiditas, keahlian finansial komite audit, struktur kepemilikan publik dan jenis kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan.
Edo Bangkit Prayoga dan Luciana Spica Alilia (2013)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011	<p><u>Variabel Independen</u> kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan.</p> <p><u>Variabel Dependen</u> Pengungkapan Manajemen Risiko</p>	<p>Secara simultan ukuran perusahaan, frekuensi pertemuan komite audit, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, keahlian finansial komite audit, struktur kepemilikan publik dan jenis kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan.</p> <p>Secara parsial kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.</p>
Fuji juwita sari (2013)	Pengaruh <i>corporate governace</i> , konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap <i>enterprise risk management</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	<p><u>Variabel independen</u> Tingkat <i>leverage</i> komisaris independen, reputasi auditor, <i>risk management committee</i>, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh</p> <p><u>Variabel dependen</u> Pengungkapan <i>enterprise risk management</i></p>	<p>Secara simultan Tingkat <i>leverage</i> komisaris independen, reputasi auditor, <i>risk management committee</i>, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>Secara parsial Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>, reputasi auditor, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan, berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i></p>

Tabel 2.1. Sambungan

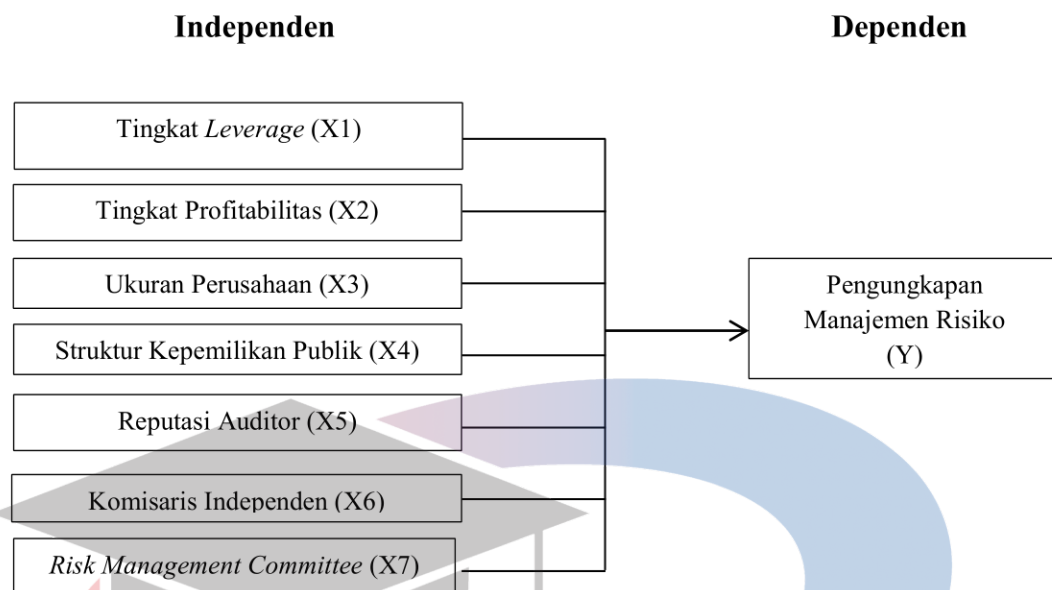
Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Ikra Febri Ananda (2013)	Pengaruh struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel independen</u> Kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan dewan komisaris independen <u>Variabel dependen</u> Pengungkapan manajemen risiko	<u>Secara simultan</u> Kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan asing kepemilikan publik, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko <u>Secara parsial</u> Kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, dan kepemilikan asing berpengaruh negatif, terhadap pengungkapan manajemen risiko Kepemilikan publik, dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Isbriandien Cahya Utami (2015)	Pengaruh dewan komisaris, komite audit, internal audit, komite manajemen risiko dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	<u>Variabel independen</u> dewan komisaris, komite audit, internal audit, komite manajemen risiko dan ukuran perusahaan <u>Variabel dependen</u> Pengungkapan <i>enterprise risk management</i>	<u>Secara simultan</u> dewan komisaris, komite audit, internal audit, komite manajemen risiko dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. <u>Secara parsial</u> komite manajemen risiko dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan ERM. Sedangkan kompetensi dewan komisaris, komite audit independen dan internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM.
Magda Kumalasari (2014)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko	<u>Variabel independen</u> Tingkat leverage, jenis industri, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik <u>Variabel dependen</u> Pengungkapan manajemen risiko	<u>Secara simultan</u> <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas dan reputasi auditor berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. <u>Secara simultan</u> <i>Leverage</i> dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap luas pengungkapan manajemen risiko, sedangkan ukuran perusahaan dan reputasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Layyinatasy Syifa (2013)	“Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”	“Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”.	<u>Secara simultan</u> Ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan chief risk berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. <u>Secara parsial</u> <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, <i>chief risk officer</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.
Windy gessy anisa (2012)	Analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen resiko pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	<u>Variabel independen</u> Tingkat <i>leverage</i> , jenis industri, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik <u>Variabel dependen</u> Pengungkapan manajemen resiko	<u>Secara simultan</u> Tingkat leverage, jenis industri, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen resiko <u>Secara parsial</u> Tingkat <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berhubungan positif secara signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan jenis industri, tingkat profitabilitas dan struktur kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh signifikan dengan pengungkapan risiko.

2.3. Kerangka Konseptual

Berikut ini dapat dilihat pengaruh antara variabel tingkat *leverage*, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, reputasi auditor, komisaris independen dan *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesa

2.4.1. Pengaruh Tingkat *Leverage* Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Tingkat *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Perusahaan yang memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham atau *stakeholder* dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan sekaligus membatasi investasi mereka [13]. Tingginya tingkat *leverage* menunjukkan struktur modal dengan jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah ekuitasnya, hal ini dapat menyebabkan perusahaan lebih berisiko atas kemungkinan kesulitan dalam hal melunasi utang beserta bunganya.

Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan menyebabkan semakin luasnya tingkat pengungkapan risiko karena dengan semakin tingginya tingkat utang menyebabkan permintaan akan transparansi informasi oleh pengguna laporan perusahaan. Tingkat *leverage* menunjukkan bagaimana perusahaan harus menanggung risiko atas utang yang dimilikinya.

Terdapat hubungan yang positif antara tingkat *leverage* dengan pengungkapan manajemen risiko, hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh [2] yang menemukan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis.

H1 : Tingkat *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.4.2. Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Tingkat Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu [14]. Tingkat profitabilitas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan risiko yang lebih luas dibandingkan perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas atau kerugian. Hal ini terjadi karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk meningkatkan kompensasi mereka.

Berdasarkan *agency theory* tingkat profitabilitas merupakan suatu indikator kemajuan perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka akan menyebabkan ketertarikan principal untuk membeli saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi institutional investor maka akan semakin kuat kontrol eksternal perusahaan tersebut dan mengurangi biaya keagenan.

Perusahaan yang memiliki penurunan profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan investor terhadap pengelola perusahaan. Hal ini dikarenakan rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh [2] menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H2 : Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan, yang dapat diukur dengan mengetahui total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *corporate governance* dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu, semakin besar perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi.

Perusahaan besar memiliki banyak pemangku kepentingan oleh karena itu semakin besar perusahaan maka semakin luas pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Tekanan yang diberikan oleh banyak pemangku kepentingan membuat perusahaan mengungkapkan risiko lebih banyak [12]. Penelitian yang dilakukan oleh [12] menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.4.4. Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Struktur kepemilikan dibagi dalam dua yaitu struktur kepemilikan manajerial (internal) dan struktur kepemilikan publik (eksternal). Pada Negara yang perlindungan terhadap investornya lemah, pemusatan kepemilikan menjadi pengganti dari perlindungan terhadap investor. Hal ini dikarenakan, jika saham lebih banyak dipegang oleh kepemilikan eksternal maka pihak perusahaan dituntut untuk memberikan laporan yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap investor .

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya [8]. Semakin banyak saham yang dimiliki publik, maka semakin banyak *stakeholder* yang harus menerima manfaat dari laporan tahunan perusahaan. Sehingga, permintaan para *stakeholder* akan pengungkapan yang lebih luas, menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi khususnya informasi mengenai risiko secara transparan dan lengkap. Menurut teori *stakeholder*, dengan

mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* [2]. Struktur kepemilikan publik menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak luar (masyarakat). Penelitian yang dilakukan oleh [23] menemukan bahwa struktur kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H4 : Struktur kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.4.6 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali [22]. Dewan komisaris merupakan pihak yang mewakili pemegang saham untuk mengontrol manajemen perusahaan melakukan aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan yang didasari untuk kepentingan pemegang saham. Tanggung jawab utama dari dewan komisaris adalah menetapkan risiko yang mana harus dikelola oleh satuan kerja manajemen. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung lebih memperhatikan risiko perusahaan dibandingkan proporsi komisaris independen rendah. [25] . Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H5 : Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.4.7 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Kantor akuntan publik yang termasuk dalam big four merupakan kantor akuntan publik yang memiliki label reputasi auditor yang mempunyai kualitas audit yang terpercaya. Banyak perusahaan yang menggunakan auditor *big four* karena dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko, sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko. Oleh karena itu,

perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait risiko yang terjadi di dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh [24] yang menemukan bukti empiris bahwa auditor *big four* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Auditor dengan kualitas kinerja yang tinggi lebih dipercaya oleh pihak *stakeholder* dalam melakukan tugasnya untuk melakukan monitoring terhadap perusahaan. Selain itu, terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang di audit *big four* untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit *non big four*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H6 : Reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.4.8 Pengaruh *Risk Management Comitee* terhadap pengungkapan manajemen risiko

Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2011 menyatakan bahwa *Risk Management Committee* adalah organ Dewan Komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. *Risk Management Comitee* merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk khusus mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Perusahaan yang memiliki *Risk Management Committee* dapat lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi seluruh pengendalian internal dan menangani risiko yang mungkin terjadi. Keberadaan *Risk Management Committee* dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi [26]. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H7 : *Risk management committee* berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.